

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Arab Saudi merupakan negara yang berada di Timur Tengah yang mana negara Arab Saudi dikenal dengan jantungnya umat muslim dikarenakan di Arab Saudi terdapat Baitullah tempat berkunjungnya umat islam di seluruh dunia. Selain itu juga Arab Saudi dikenal sebagai negara penghasil minyak terbesar di dunia. Dengan adanya sumber daya alam yang melimpah hal itu menjadikan sumber pendapatan utama bagi Arab Saudi. Meskipun demikian, dari waktu ke waktu minyak bumi di Arab Saudi pasti berkurang sehingga bisa menjadi ancaman bagi perekonomian Arab Saudi.

Di tahun 2014 terjadinya penurunan harga minyak secara drastis, dikarenakan sebelumnya dihargai dengan \$100 per barel lalu menjadi \$50 per barel yang merupakan setengahnya dari harga awal (BBC, 2016). Dari waktu ke waktu kondisi ekonomi di seluruh dunia selalu berubah, terkadang harga minyak bumi bisa turun dan juga bisa naik. Dapat terlihat bahwasannya pendapatan dari minyak akan menjadi ancaman bagi perekonomian Arab Saudi yang mana Arab Saudi sangat bergantung terhadap pendapatan dari minyak. Dikarenakan kondisi dari minyak selalu berubah dan tidak jelas maka dari itu di tahun 2016 Arab Saudi melakukan pencegahan dengan diadakannya suatu kebijakan yang di prakasai oleh putra mahkota yakni Mohammad Bin Salman melalui kebijakan Saudi Vision 2030 yang mempunyai kebijakan utama yakni mendiversifikasi ekonomi (Haryadi, 2018).

Mohammad Bin Salman (MbS) merupakan putra ke-7 Raja Salman bin Abdulaziz dari istri ketiganya yang bernama Fahda binti Falah bin Sultan Al Hithalayn (Haryadi, 2018). Mohammad bin Salman lahir pada tanggal 31 Agustus 1985, ditahun 2023 ia berusia 38 tahun. Di tahun 2017 Mohammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota yang akan menjadi penerus raja apabila suatu saat nanti raja wafat. Sebelum menjadi putra mahkota, Mohammad bin Salman lulusan dari jurusan Hukum di Universitas Raja Saud pada tahun 2007, setelah lulus Mohammad bin Salman bekerja sebagai sekretaris Jenderal Dewan Kompetitif di Riyadh, penasihat khusus Ketua Dewan Yayasan Raja Abdulaziz, dan anggota dewan pengawas masyarakat Albir untuk pembangunan.

Selanjutnya dalam memasuki ranah politik Mohammad bin Salman memulai dengan menjadi penasihat penuh waktu Dewan Menteri selama dua tahun. Kemudian di tahun 2009 dengan menjadi penasihat khusus Salman bin Abdulaziz yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur di Provinsi Riyadh, dan juga menjadi konsultan paruh waktu untuk melayani komisi ahli kabinet pemeritahan Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2011 saat diangkatnya Salman bin Abdulaziz sebagai wakil perdana menderi dan menteri pertahan kedua, Mohammad bin Salman dijadikan sebagai penasihat pribadi Salman bin Abdulaziz (Aljazeera, 2017). Posisi yang semakin berkembang dan meningkat Mohammad bin Salman tersebut dikarenakan dengan seiringnya perpindahannya posisi Salman bin Abdulaziz dalam pemerintahan Arab Saudi. Ketika Salman bin Abdulaziz menjadi Raja di tahun 2015, Mohammad bin Abdul Aziz pun dijadikan sebagai Menteri Pertahanan Arab Saudi. Disisi lain Mohammad bin Salman juga menjadi Ketua Dewan Urusan ekonomi dan Pembangunan serta Ketua Dewan Urusan Politik dan

Keamanan. Sejak dibuatnya Visi Arab Saudi 2030, Mohammad Bin Salman mengambil kepemimpinan dalam restrukturisasi ekonomi Arab Saudi yang berorientasi strategis negara untuk 15 tahun ke depan (Factsnippet, 2022).

Lalu ditahun 2022 Mohammad bin Salman menjadi Perdana Menteri (Ikhsanudin, 2022). Hal tersebut disebabkan karena Raja Salman bin Abdulaziz memerintah merombak ulang penataan kabinet Arab Saudi serta Mohammad bin Salman ditunjuk menjadi Perdana Menteri serta ditunjuk juga oleh para menteri seniornya salah satunya seperti; Menteri Luar Negeri yakni Faisal bin Farhan, Menteri Keuangan yakni Mohammed Al-Jadaan, dan Menteri Investasi yakni Khalid Al-Falih (Aljazeera, 2022a). Maka dari itu Mohammad bin Salman tidak hanya menjadi putra mahkota saja melainkan juga sebagai orang yang menjalankan roda pemerintahan di negara Arab Saudi. Penyebab dijadikannya Mohammad bin Salman sebagai perdana menteri dikarenakan kondisi kesehatan raja yang semakin menurun, dan juga sudah jarang menampakkan diri di depan publik.

Meskipun dengan diangkatnya Pangeran Mohammad bin Salman sebagai Perdana Menteri mengejutkan, karena jarang ada orang selain raja yang memegang posisi ini. Seperti pada pasal 56 Hukum Dasar Pemerintahan di Arab Saudi, terkait dengan tugas perdana menteri, menyatakan bahwa “Raja adalah Perdana Menteri”. Dengan menjadikannya Pangeran Mohammad bin Salman menjadi Perdana Menteri, perintah kerajaan menyatakan: “Pangeran Muhammad bin Salman, Putra Mahkota, akan menjadi Perdana Menteri, sebagai pengecualian dari ketentuan Pasal (lima puluh enam) Hukum Dasar Pemerintahan, dan dari ketentuan yang relevan terkandung dalam UU Kabinet” (Dw, 2022). Sehingga secara de jure juga Mohammad bin Salman telah sah sebagai Perdana Menteri. Namun meskipun

demikian tetap raja lah yang menjadi kepala negara, Mohammad bin Salman hanya sebagai pemimpin pemerintahannya.

Mohammad bin Salman dipandang sebagai penguasa de facto Arab Saudi, sebab semenjak pemerintahan Arab Saudi berada dibawah kepemimpinan Mohammad bin Salman, putra mahkota tersebut telah menguasai seluruh pemerintahan negara, mulai dari keamanan, birokrasi hingga perekonomiannya. Dalam menjalankan pemerintahan dibawah kepemimpinan Mohammad bin Salman di Arab Saudi, Mohammad bin Salman membuat banyak perubahan seperti ketika Mohammad bin Salman diangkat sebagai putra mahkota, ia melakukan kebijakan anti-korupsi dimana hal ini membuat banyaknya pangeran, para pemimpin bisnis, dan pejabat senior ditangkap. Para pangeran yang ditangkap seperti Pangeran Ahmed bin Abdulaziz adik dari Raja Salman bin Abdulaziz, Pangeran Mohammed bin Nayef yang merupakan keponakan Raja Salman bin Abdulaziz, mereka ditangkap karena diduga melakukan kontak dengan kekuatan asing, salah satunya Amerika Serikat dengan tujuan untuk melakukan kudeta terhadap Raja Salman (CNBC, 2020). Selain itu adapula Pangeran Abdullah bin Faisal ditangkap dibawah kepemimpinan pemerintahan Mohammad bin Salman disebabkan ketahuan mengobrol mengenai penahanan terhadap sesama pangeran melalui panggilan telepon umum dengan pengacara saat berada di Boston Amerika Serikat, tuduhan lainnya Pangeran Abdullah bin Faisal melakukan kerjasama dengan jurnais, advokat, penulis di penjara hal tersebut mengakibatkan tuduhan bahwa Pangeran Abdullah bin Faisal melakukan tindakan untuk mengacaukan Kerajaan Arab Saudi, mengganggu persatuan sosial, dan mendukung musuh kerajaan (VOI, 2022). Kemudian para pemimpin bisnis yang ditahan seperti Pengusaha sekaligus

Pangeran Alwaleed bin Talal di tahun 2017, dia merupakan anggota kerajaan yang paling kaya diantara para anggota kerajaan lainnya. Alwaleed bin Talal mengumpulkan kekayaannya berasal dari saham dan properti seperti memiliki saham di Twitter Inc, Citigroup Inc, memiliki investasi di Hotel Plaza di New York dan Hotel George V di Paris. Alwaleed bin Talal juga memiliki kekayaan sebanyak \$17 miliar. Karena memiliki kekayaan yang dimiliki, Alwaleed bin Talal di tahan dengan tuduhan melakukan korupsi (Astiana, 2018). Masih banyak lagi para pangeran, pebisnis dan juga pejabat senior yang ditangkap.

Perubahan selanjutnya memberikan hak perempuan untuk mengemudi, membuka bioskop, perubahan acara olahraga, perubahan acara hiburan, dapat diketahui bahwa baru-baru ini salah satu *girlband* Blackpink yang merupakan *girlband* yang berasal dari Korea mendatangi ke Arab untuk konsernya (Yulianingsih, 2022). Tidak hanya itu Mohammad bin Salman memiliki pandangan jauh untuk kedepannya atas negara Arab Saudi dengan menyadari bahwa perlu adanya pembebasan negaranya dari ketergantungan minyak dan juga terbelenggunya terhadap agama kuno, maka dari itu dia membuat kebijakan “Vision Saudi 2030”.

Visi Arab Saudi 2030 ini di umulkannya ditanggal 25 April 2016. Setelah di umulkannya Visi Arab Saudi 2030, kebijakan tersebut menjadi pusat perhatian dunia, karena Visi Arab Saudi 2030 memiliki target yang berbeda dari biasanya. Visi Arab Saudi 2030 merupakan suatu misi Arab Saudi yang memiliki tujuan untuk mendiversifikasi sumber pendapatannya tidak lagi bergantung terhadap minyak tetapi beralih pada perekonomian lainnya dalam beberapa sektor seperti pariwisata, kesehatan, pendidikan, keuangan, ketahanan dan lain sebagainya. Selain

itu juga Visi Arab Saudi 2030 memiliki tujuan untuk menciptakan ekonomi yang berkembang, kuat, dan juga stabil dengan menjalin kerjasama dengan sektor swasta untuk menambah relasi dan persaingan pekerjaan secara sehat dan juga untuk kesejahteraan masyarakat Arab Saudi dalam kurun waktu yang sangat panjang (Naseem & Dhruva, 2017).

Visi Arab Saudi 2030 memiliki 3 pilar penting yakni *A Vibrant Society*, *Thriving Economy*, dan *An Ambition Nation*. *A Vibrant Society* atau masyarakat yang dinamis yang maksudnya Arab Saudi ingin meningkatkan sumber daya manusianya, karena Arab Sudi merasa bahwa suatu kekayaan negara tidak hanya terletak pada sumber daya alamnya saja. *Thriving Economy* atau pengembangan ekonomi yang memiliki tujuan untuk melepaskan ketergantungan Arab Saudi dari minyak dan gas sehingga dilakukannya diversifikasi ekonomi agar dapat memperluas investasi sebagai sektor tambahannya dalam jangka panjang dan menjadi pusat investasi global. Terakhir *An Ambition Nation* atau ambisi nasional negara yang bertujuan ingin para jajaran birokrasinya melakukan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi terutama terhadap proyek yang mempunyai dampak yang sangat tinggi terhadap perekonomian Arab Saudi (Sianturi, 2017).

Dengan kebijakan Visi Arab Saudi 2030 menginginkan lebih modern dari biasanya, bahwasannya dahulu Arab Saudi ini dicirikan sebagai negara yang konservatif. Putra Mahkota Pangeran Mohammad Bin Salman yang membuat kebijakan Visi Arab Saudi 2030 ingin menghapus budaya Arab Saudi yang masih melekat dan dijalankan oleh masyarakat Arab Saudi. Sehingga Pangeran Mohammad Bin Salman ingin menghapus budaya tersebut dengan mengubahnya menjadi budaya yang lebih modern. Kebijakan Visi Arab Saudi 2030, Pengeran

Mohammad Bin Salman menginginkan bahwasannya Arab Saudi menjadi negara yang terbuka, baik dari sisi pemerintahan, masyarakat terutama perekonomiannya. Yang paling penting dalam perubahan melalui Visi 2030 ialah dalam sektor pariwisata dan dalam sektor investasi untuk masyarakat dunia. Karena kedua poin tersebut membuat negara Arab Saudi menjadi negara yang terbuka dan membuat Arab Saudi sebagai negara yang liberalisme. Sebab apabila Arab Saudi tetap menjadi negara tertutup di era globalisasi yang modern ini Arab Saudi akan tertinggal dalam semua aspek khususnya pariwisata dan investasi.

Arab Saudi memiliki potensi yang sangat tinggi dalam investasi. Sebab selain Arab Saudi memiliki kekayaan alam yang melimpah minyak, Arab Saudi pun memiliki hubungan yang baik dengan banyak negara baik dari Eropa, Asia, Barat. Ditambah dengan adanya kebijakan Visi Arab Saudi 2030 yang dibawah pemerintahan Mohammad Bin Salman membuat keterbukaan dan transparasinya Arab Saudi terhadap negara global. Ditahun 2017 akhir bulan Februari dan bulan Maret para aktor pemerintahan Arab Saudi seperti Raja Salman Bin Abdul Aziz beserta para delegasinya termasuk 19 pangeran dan 10 menteri. 19 pangeran tersebut ialah Pangeran Mansour bin Saud, Pangeran Talal bin Saud, Pangeran Sattam bin Saud, Pangeran Khalid bin Fahd bin Mohammed, Pangeran Mohammad bin Fahd, Pangeran Ahmed bin Fahd, Pangeran Khalid bin Bandar, pangeran Faisal bin Khalid bin Sultan, Pangeran Mohammed bin Abdurrahman, Pangeran Mansour bin Muqren, Pangeran Abdurrahman bin Badr, Pangeran Saud bin Salman, Pangeran Naif bin Salman, Pangeran Rakan bin Salman, Pangeran Mohammad bin Salman, Abdulaziz bin Salman, Sultan bin Salman, dan lainnya (Valentina, 2017).

Para menteri yang datang ialah Menteri Energi yakni Khalid Al-Falih, Menteri Pertahanan yakni Mohammad bin Salman, beserta menteri lainnya.

Para aktor pemerintahan tersebut mengunjungi beberapa negara salah satunya ke negara yang berada di Asia seperti Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, China, Jepang, dan Maladewa (Rahman Abd Musthafa, 2017). Hal tersebut dilakukan karena menurutnya harga minyak global serta kondisi politik global tidak menentu sehingga memaksa Arab Saudi harus terus giat dan fokus dalam memperkuat hubungan diplomatiknya dengan negara-negara lain demi mewujudkan kebijakan Visi Arab Saudi 2030, terutama dalam sektor industri otomotif.

Di zaman yang modern sekarang ini industri otomotif merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena industri otomotif memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi suatu negara dan dengan adanya industri otomotif ini kegiatan yang dilakukan setiap masyarakat menjadi lebih singkat dan cepat. Di negara Arab Saudi sendiri perkembangan industri otomotif terus menerus meningkat dari tahun ke tahunnya, dapat terlihat dari penambahan kepemilikan mobil dari tahun ke tahunnya terutama kota Riyadh. Riyadh merupakan kota metropolitan yang berkembang pesat yang mengikuti tren dunia dalam hal transportasi. Yang mana jumlah total mobil yang digunakan meningkat dari 26.880 menjadi 670.300 antara tahun 1968 hingga 1996. Selain itu menunjukkan bahwa kepemilikan mobil telah meningkat dari 22.805 mobil pada tahun 1971 menjadi 2.052.934 mobil pada tahun 1996. Selanjutnya pada tahun 1997 tingkat kepemilikan kendaraan per 1000 orang adalah 224 kendaraan mobil di Riyadh, sedangkan di kota-kota barat relatif rendah.

Waktu terus berjalan, kepemilikan mobil telah meningkat menjadi lebih dari 7.000.000 mobil di Riyadh. Dengan tingginya persentase kepemilikan mobil di wilayah tersebut menyebabkan pembangunan jalan tol, dan jalan arteri lintas kota. Alasan mengapa Riyadh menjadi kota mobil adalah karena masyarakatnya tidak suka menggunakan transportasi umum (Zeaara, 2022).

Hal tersebut dapat terjadi karena adanya faktor pendorong dari investasi di dalamnya. Faktor-faktor yang mendukung untuk berinvestasi di Arab Saudi seperti; lokasi geografis yang baik, sumber daya mineral yang melimpah, layanan berkualitas tinggi, kader generasi muda yang berkualitas, mempunyai hubungan yang kuat dengan pasar global, memiliki lingkungan infrastruktur yang maju, dan kemampuan industri kualitatif (Saudinesia, 2022). Faktor lainnya pun ialah bagi masyarakat yang memiliki kendaraan mobil dibebaskan dari pajak kendaraan baik mobil, hanya saja cukup membayar KIR mobil. KIR mobil merupakan salah satu rangkaian prosedur dalam menentukan kelayakan suatu kendaraan ketika hendak digunakan dan bagi seseorang yang telah menyelesaikan prosedur KIR kendaraan setiap tahunnya akan diberikan sebuah tanda dengan diberi label. Hal ini berlaku bagi mobil yang mempunyai kualitas harga rendah hingga kualitas tinggi sekalipun (Anggraini, 2022). Dapat dibuktikan dengan penjualan mobil mengalami peningkatan ditahun 2019 sebanyak 460.373.000 satuan dibandingkan ditahun 2018 sebanyak 340.218.000 satuan (CEIC, 2022).

Ditambah dengan semenjak diberlakukannya kebijakan Visi Arab 2030 wanita di Arab diperbolehkan mengendarai mobil sendiri, dimana sebelum adanya kebijakan tersebut wanita hanya bisa melakukan kegiatan secara terbatas tetapi setelah dilakukannya perubahan wanita diperbolehkan melakukan kegiatan

layaknya seorang lelaki terutama dalam mengemudi, sehingga membuat pengemudi di Arab Saudi semakin meningkat. Dengan diperbolehkan wanita mengemudi sendiri, tahun 2018 Arab Saudi mengadakan pameran mobil untuk wanita, hal itu merupakan pertama kalinya dalam sejarah Arab Saudi. Pameran tersebut bertempat di salah satu Mall yang berada di Jeddah. Maka dari itu pengemudi wanita mengalami peningkatan sebanyak tiga juta (PWC, 2018). Sedangkan pengemudi pria yang ditahun 2017 sebanyak 9 juta lalu terjadinya peningkatan menjadi 9,5 juta ditahun 2020. Otomatis pengguna mobil semakin meningkat, terbukti juga ditahun 2021 penjualan otomotif di Arab mencapai kurang lebih 73 juta unit dengan nilai \$28 miliar (Yusuf, 2021).

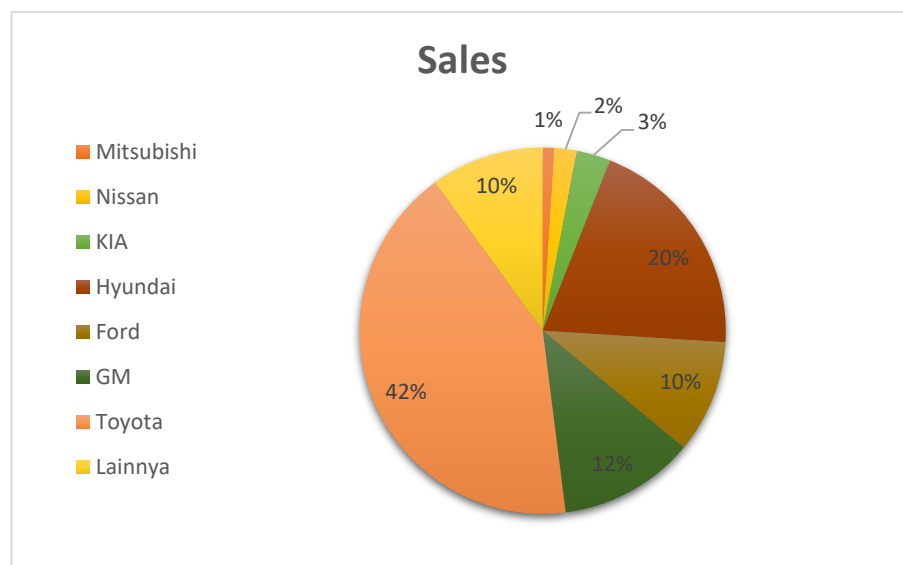
Dengan adanya diversifikasi ekonomi melalui kebijakan Visi 2030 dalam perkembangan industri otomotif memberikan peluang terhadap Arab Saudi seperti peluang terhadap pemerintah, investor lokal ataupun asing, investor swasta, perusahaan leasing mobil, dan lain-lainnya. Dalam hal ini mitra industri otomotif Arab Saudi pun dari beberapa negara seperti Jepang, China, Korea, Amerika Serikat, Jerman. Banyak merek mobil yang dihasilkan oleh negara-negara tersebut, baik dari Korea ada merek Hyundai, KIA, dari Amerika seperti Jeep, Ford, dari Jerman seperti BMW, Mercedes Bens dari China Changan, Hongqi, Dongfeng, dan dari Jepang seperti; Mitsubishi, Nissan, Toyota, Lexus, Suzuki dan lain sebagainya. Dari banyaknya merek mobil, namun masyarakat Arab Saudi lebih tertarik dan banyak yang memakai mobil dari negara Jepang.

Meskipun mobil dari Amerika Serikat, Jerman lebih bagus dari mobil buatan Jepang tetapi mobil yang berasal dari Jepang juga tidak kalah dari segi keunggulannya seperti; harga lebih murah, kondisi mobil baik dan kuat,

berteknologi tinggi dan mesinnya hemat bahan bakar. Sehingga para masyarakat Arab Saudi yang sederhana hingga kaya pun mampu untuk membeli mobil buatan Jepang daripada yang berasal dari Amerika Serikat (Next-drive, 2021). Sedangkan mobil dari Amerika Serikat dan Jerman lebih mahal untuk dibeli, yang mengakibatkan hanya orang kalangan kaya saja yang dapat membeli mobil buatan Amerika dan Jerman.

Dapat dibuktikan pada tahun 2013 Toyota telah menunjukkan penjualan yang kuat di pasar mobil Saudi dan pangsa pasar sekitar 40% dari penjualan mobil di Arab Saudi.

Gambar 1 Gambar 3 Pangsa pasar Arab Saudi 2013



Sumber: Randheer et al., 2017

Jepang merupakan negara yang berada di Asia dengan skala perekonomian besar dan juga merupakan negara produsen otomotif terbesar di dunia. Kekuatan perekonomian Jepang ini merupakan hasil dari banyaknya industrialisasi. Banyaknya perusahaan Industri di Jepang membuat banyaknya tenaga asing yang

masuk ke negara tersebut untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan perusahaan itu. Disisi lain juga Jepang melakukan ekspor dalam berbagai komoditas terutama komoditas otomotif. Dikarenakan Jepang memiliki industri yang banyak sehingga Jepang mendorong perusahaan non-negara untuk melakukan investasi di berbagai dunia. Apabila non-negara melakukan investasi di berbagai negara tentunya membawa nama baik negara untuk memperlancar dalam melakukan kerjasamanya.

Dalam hal ini Jepang terus memfokuskan industri otomotif di pasar global, sebab hasil dari industri otomotif ini memberikan dampak yang besar bagi negara Jepang tersendiri. Adanya industri otomotif, Jepang mendapatkan pengakuan di pasar global, menambah nilai penghasilan terhadap Jepang, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), hingga menjadi negara maju dengan terkenalnya dari industri otomotif.

Di tahun 2016 dengan kebijakan Visi Arab Saudi 2030. Pangeran Mohammad bin Salman sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan ditunjuk untuk melakukan kunjungan ke Jepang. Pada kunjungan tersebut mencapai lompatan kuantum antara Arab Saudi dan Jepang, yang menghasilkan kesepakatan dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk membentuk kelompok bersama antara kedua negara yang disebut “Visi Saudi-Jepang 2030”. Ditambah ditahun berikutnya Raja Salman bin Abdulaziz, Putra Mahkota Mohammad bin Salman beserta para pemerintahan Arab Saudi melakukan perjalanan ke Jepang, China, dan negara-negara Asia Timur lainnya untuk membahas perdagangan dan investasi. Dalam kunjungan tersebut Putra Mahkota Mohammad bin Salman mengirimkan pesan yang kuat bahwa Arab Saudi terbuka untuk bisnis (Chahrour, 2020).

Saat di sela-sela kunjungan Raja Salman bin Abdulaziz ke Toyko, Jepang. Arab Saudi dan Jepang melakukan kerjasama hingga terjadinya penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) diantara Toyota Motor Corp (Toyota) dan National Industrial Cluster Development Program (NICDP). Kerjasama ini mengenai studi kelayakan proyek industri untuk memproduksi dan suku cabang di Arab Saudi. Yang mendatangi nota kesepahaman ini ialah Menteri Negara dan Anggota Kabinet ialah Dr. Ibrahim As-saf atas nama Menteri Energi, Industri, Sumber Daya Mineral Saudi, dan Ketua Insinyur Direktur NICDP yakni Khalid Al-Falih, dan Ketua Direksi Toyota Takeshi Uchiyamada (spa.gov, 2017). Bentuk dari kerjasama ini ialah pembangunan transportasi.

Toyota Motor Corp merupakan salah satu perusahaan dengan produsen mobil terbesar di dunia. Perusahaan Toyota Motor Corp bermarkas di kota Tokyo, Jepang. Perusahaan tersebut didirikan pada tahun 1937 tanggal 28 bulan Agustus (Gaikindo, 2020). Dan Program Pengembangan Klaster Industri Nasional atau National Industrial Cluster Development Program (NICDP) merupakan suatu lembaga pemerintah Arab Saudi yang didirikan pada tahun 2008 yang berada dibawah pengawasan Kementerian Perdagangan dan Investasi, Kementerian Energi, Industri, dan Kementerian Sumber Daya Mineral. Lembaga pemerintahan ini merupakan sebuah strategi untuk mencapai diversifikasi Visi Arab Saudi 2030.

Kesepakatan ini merupakan sebuah rencana NICDP untuk pengembangan industri otomotif yang berdaya saing global di Arab Saudi dan menegaskan perhatian kedua belah pihak untuk melanjutkan proyek sebagian bagian dari visi Arab Saudi 2030 (Saudi Arabia Embassy, 2017). Tidak hanya itu studi ini juga untuk mempertimbangkan evaluasi pengembangan basis pasukan lokal dengan

menggunakan bahan yang diproduksi oleh perusahaan besar seperti Sabic, Maaden, Petro Rabigh, dan perusahaan besar lainnya yang berada di Arab Saudi. Dan juga mempelajari pengembangan dan daya tarik tenaga kerja Saudi yang berbakat dan ditempatkan di program pelatihan yang memadai (Nurhayati, 2017).

Saat kunjungan Arab ke Jepang di tahun 2017 Duta Besar Arab Saudi untuk Jepang mengatakan bahwa “Jepang memiliki reputasi yang luar biasa, dan Kerajaan berharap dapat bekerjasama dengan Jepang untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah” (Arabnews, 2021). Dan juga menurut Presiden Badan Kerjasama Internasional Jepang yakni Akihiko Tanaka bahwa bekerjasama antara kedua negara ini sangatlah penting bagi Jepang karena menurutnya bahwa “Visi kami bekerjasama dengan Arab Saudi adalah menciptakan manfaat bersama untuk mewujudkan dunia yang lebih berkelanjutan” (Arabnews, 2022). Disisi lainnya Jepang dan Arab Saudi memiliki hubungan diplomatik yang baik sejak tahun 1955, hubungan antar kedua negara tersebut berjalan dengan mulus hingga saat ini.

Dengan hubungan diplomatik tersebut kedua negara sama-sama mendapatkan keuntungan. Mengingat kedua negara memiliki sejarah hubungan diplomatik yang kuat, baik dan stabil. Dengan Arab Saudi yang ingin mewujudkan diversifikasi ekonomi melalui kebijakan Visi Arab Saudi 2030, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokalnya, dan kepentingan dari Jepang sendiri ialah untuk meningkatkan ekonomi Jepang melalui ekspansi pasar Toyota di Arab Saudi.

Maka dari itu kedua negara tersebut merupakan mitra ideal untuk berkontribusi secara komprehensif dalam pembangunan ini, dari modal pengetahuan dan daya saing di bidang teknologi. Atas kepentingan antara kedua negara tersebut diperkuat dengan Visi Saudi-Jepang 2030. Sehingga Jepang memberikan bantuan kerjasama

berdasarkan proyek, menerima peserta pelatihan di sektor-sektor seperti manufaktur, pertambangan, komunikasi, dan penyiaran, mengirimkan tenaga ahli ke negara Arab Saudi, dan mempromosikan bantuannya untuk membantu meningkatkan tingkat teknologi Arab Saudi di masa depan (Ministry Of Foreign Affairs of Japan, 2019). Selain itu juga yang dilakukan Jepang dalam kerjasama ini ialah memfasilitasi transisi menuju revolusi industri ke-4, dan memfasilitasi peningkatan produktivitas di industri jasa.

Maka dari itu dengan adanya Visi Arab Saudi 2030 menjadi peluang bagi negara-negara lain untuk dapat melakukan kerjasama di Arab Saudi dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Arab Saudi. Hal tersebut merupakan langkah yang sangat tepat sebab Arab Saudi dengan gencar-gencarnya dengan visi 2030, Arab Saudi juga dapat menjalin hubungan dan kerjasama yang baik terhadap banyak negara dalam berbagai sektor, salah satunya dalam industri otomotif dengan Jepang. Oleh karena itu dibawah pemerintahan putra mahkota Mohammad Bin Salman kerjasama Jepang dan Arab Saudi dapat saling menguntungkan terhadap kedua belah pihak dan diharapkan kerjasama yang telah disepakati dapat berjalan dengan baik dan lancar demi memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara baik terhadap Arab Saudi dan juga Jepang.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Kerjasama Arab Saudi - Jepang Dalam Pengembangan Industri Otomotif Di Saudi Arabia.**

1.2. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut'

“Bagaimana implementasi kerjasama industri otomotif antara Arab Saudi dan Jepang dari tahun 2017 hingga 2021?”

1.3. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah penulis paparkan, maka penulis perlu membatasi masalah agar pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus pada alasan Arab Saudi memilih Jepang sebagai pengembang industri otomotif dibawah kepemimpinan Pangeran Mohammad Bin Salman hingga terjalannya kerjasama diantara kedua negara, beserta penulis membatasi masalah agar pembahasan yang peneliti tulis lebih terfokuskan. Penulis menitik beratkan tulisan ini dari tahun 2017 sampai tahun 2021. Hal ini supaya tidak terjadi kerancuan ataupun kesimpangsiuran dalam menginterpretasikan hasil penelitian. Ruang lingkup penelitian dimaksudkan sebagai penegasan mengenai batasan-batasan objek.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hubungan kerjasama bilateral antara Arab Saudi dan Jepang
2. Untuk mengetahui perkembangan industri otomotif di Arab Saudi
3. Untuk mengetahui hambatan kerjasama bilateral antara Arab Saudi dan Jepang dalam bidang otomotif Toyota di Arab Saudi

1.4.2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi setiap orang yang memiliki ketertarikan dengan investasi Jepang di Arab Saudi dalam sektor otomotif melalui Visi 2030. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam berbagai hal, adapun kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi bahan kajian dan literasi para mahasiswa, khususnya Studi Hubungan Internasional.
3. Untuk dijadikan bahan literasi atau sumber kajian penelitian selanjutnya.